

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

Asnani USMAN*

Sejak bulan Maret 1980 yang lalu tampak suatu kesibukan diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Di satu pihak terjadi kunjungan Menlu RRC Huang Hua dan Menlu Vietnam Nguyen Co Thach ke negara-negara ASEAN. Di lain pihak terjadi kunjungan diplomatik di antara negara-negara ASEAN, terutama kunjungan PM Muangthai Prem Tinsulonanda terhadap rekan-rekannya.

Topik utama yang dibicarakan adalah penyelesaian masalah Kamboja, di samping masalah-masalah bilateral lainnya di antara mereka. Masing-masing pihak berusaha saling mengadakan pendekatan dalam mencari penyelesaian politik masalah Kamboja yang dapat diterima oleh semua pihak. Tetapi tampaknya hal ini bukan saja menemui rintangan karena sikap-sikap negara yang berbeda dan tetap pada pendiriannya masing-masing, melainkan juga karena Vietnam telah mengadakan tindakan penyerbuan ke wilayah Muangthai. Tindakan ini telah menimbulkan reaksi keras dari negara-negara ASEAN yang dikemukakan dalam Konperensi Menlu ASEAN di Kuala Lumpur.

Sehubungan dengan perkembangan itu kiranya perlu ditinjau lebih jauh sikap-sikap negara yang ada serta apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kemungkinan penyelesaiannya.

PERKEMBANGAN SITUASI

Pada bulan Nopember 1979 yang lalu, baik dunia internasional maupun ASEAN khususnya, menumpahkan perhatian mereka

* Staf CSIS

terhadap penyerbuan pasukan Vietnam ke Kamboja dan membanjirnya pengungsi di perbatasan Kamboja-Muangthai (lihat Peta Indocina). Resolusi yang diprakarsai oleh ASEAN mengenai masalah Kamboja telah disetujui oleh PBB tanggal 14 Nopember 1979. Resolusi ini menuntut kepada Vietnam agar menarik mundur pasukannya dari Kamboja dan membiarkan Kamboja membentuk pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Resolusi inilah yang menjadi titik tolak bagi ASEAN untuk penyelesaian masalah Kamboja.

Demikianlah perkembangan yang terjadi dan setelah itu perhatian terhadap masalah Kamboja agak menurun. Tampaknya perhatian dunia beralih kepada peristiwa lain, yaitu invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan meningkatnya ketegangan di Teluk Persia sehubungan dengan krisis Amerika Serikat-Iran. Namun ASEAN tetap berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja. Desember 1979 ASEAN sepakat untuk mengirimkan Menlu Malaysia Rithauddeen sebagai wakil ASEAN untuk berdialog dengan Vietnam, tetapi tawaran itu ditolak oleh Vietnam. Dalam pertemuan Menlu ASEAN-MEE tanggal 6 Maret 1980, ASEAN berhasil mencapai suatu pernyataan politik bersama dengan MEE mengenai masalah Kamboja yang menginginkan agar penyelesaian masalah Kamboja sesuai dengan resolusi PBB. Pernyataan ini mendapat kecaman keras, baik dari Heng Samrin maupun dari Hanoi.

PRINSIP KUANTAN

Kesibukan kunjungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara dimulai dengan kunjungan Menlu RRC Huang Hua ke Manila (11-14 Maret 1980), Kuala Lumpur (14-17 Maret 1980), dan Singapura (17-18 Maret 1980). Seminggu setelah kunjungan ini, Presiden Suharto mengadakan pertemuan dengan PM Malaysia Datuk Hussein Onn di Kuantan tanggal 26-27 Maret 1980.

Dalam pertemuan ini, selain masalah bilateral juga dibicarakan hasil pembicaraan Menlu Huang Hua di Kuala Lumpur, termasuk mengenai masalah Kamboja. Seperti diketahui Indonesia tidak menerima kunjungan Menlu Huang Hua.

Dalam pembicaraan di Kuantan ini, kedua pemimpin tersebut setuju bahwa suatu pemecahan politik masalah Kamboja harus dicapai.

Peperangan yang berlarut-larut akan memperlemah Vietnam dan sebagai akibatnya Vietnam akan makin "dekat" dengan Uni Soviet. Vietnam perlu "dijauhkan" dari Uni Soviet dan bebas dari RRC dan menjadi independen. Selanjutnya dikemukakan bahwa makin dituntutnya penarikan mundur pasukan Vietnam, hanya akan makin memperkuat tekad Vietnam untuk tetap di Kamboja. Oleh karena itu kepada Vietnam harus ditawarkan suatu pemecahan alternatif yang dapat diterima. Indonesia mempertimbangkan suatu usul kompromi berupa suatu pemerintahan koalisi di Phnom Penh serta penarikan sebagian pasukan Vietnam dari wilayah itu.¹

Demikianlah akhirnya pertemuan tersebut menghasilkan suatu formula yang disebut "Prinsip Kuantan" yang mengemukakan bahwa untuk menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, Vietnam harus netral, bebas dari pengaruh baik Uni Soviet maupun RRC.

Dalam kunjungan PM Hussein Onn ke Singapura dan kunjungan PM Prem Tinsulonanda ke Malaysia, prinsip ini dibahas, tetapi tampaknya timbul perbedaan pendapat dan sikap mengenai hal ini. Prinsip ini dianggap telah menyimpang dari kesepakatan semula yang bertitik tolak pada resolusi PBB.

KESIBUKAN DIPLOMATIK

Kunjungan PM Muangthai Prem Tinsulonanda yang sangat diharapkan oleh rekan-rekannya telah diadakan pada bulan April 1980. Kunjungan ini dilakukan sebelum Muangthai menerima kunjungan Menlu Huang Hua dan Menlu Nguyen Co Thach di negaranya.

Sebelum kunjungan PM Prem dilakukan telah timbul isu-isu dan spekulasi tertentu yang telah menimbulkan kekuatiran negara-negara ASEAN sehubungan dengan pernyataan bekas PM Kukrit Pramoj dalam wawancaranya dengan harian Bangkok *Siam Rath* yang mengemukakan bahwa Muangthai mungkin harus mengakui rezim Heng Samrin di Phnom Penh apabila hal itu tidak dapat dihindari lagi. Kemudian menjelang keberangkatannya PM Prem Tinsulonanda ke Kuala Lumpur, Bangkok membenarkan laporan bahwa hal itu akan

1 Richard Nations, "Prem Takes Peace Hopes One Step Further", *Far Eastern Economic Review (FEER)*, 9 Mei 1980; Susumu, "Major Changes in the Wind" *FEER*, 16 Mei 1980

dibicarakan langsung dengan Hanoi. Kemungkinan diadakannya pembicaraan antara Bangkok dan Hanoi telah dikemukakan untuk pertama kalinya oleh PM Pham Van Dong pada waktu kunjungannya ke New Delhi awal April yang lalu. Jika kemungkinan ini benar, maka hal ini merupakan suatu perubahan (pergeseran) yang penting dari posisi semula.¹

Indonesia pun dengan rasa khawatir mengawasi setiap tanda perubahan kebijaksanaan yang akan ditempuh Muangthai untuk mengatasi jalan buntu diplomatik. Sebelumnya Kriangsak selalu mengatakan bahwa tiada jalur suplai, tetapi pernyataan ini hampir-hampir tidak diperhatikan oleh Indonesia, dan Indonesia bahkan merasa bahwa Muangthai sudah bergerak makin dekat dengan RRC dalam menentang Vietnam. Selain itu Indonesia sangat mengharapkan suatu perubahan kebijaksanaan Kriangsak yang menolak usaha-usaha dan Amerika Serikat untuk mendukung Sihanouk.²

Semua kekhawatiran tersebut menjadi jelas setelah kunjungan PM Prem ke Malaysia dan Singapura selama tiga hari (18-20 April 1980). PM Prem menegaskan bahwa dia tidak pernah berkata bahwa Muangthai bersedia mengakui Heng Samrin. Akhirnya baik Muangthai maupun Malaysia dan Singapura setuju bahwa setiap pemecahan politik masalah Kamboja harus berdasarkan resolusi PBB.

Dalam kunjungannya ke Indonesia (25-26 April 1980) PM Prem memberikan jaminan kepada Indonesia bahwa Muangthai tidak akan mengizinkan RRC mengirimkan suplai bantuan untuk Khmer Merah melalui wilayahnya. Sedangkan kemungkinan peranan Pangeran Sihanouk dalam pemecahan politik masalah Kamboja akan dipertimbangkan kembali. Indonesia pun memberi jaminan akan mendukung keputusan Muangthai dalam hubungannya dengan Vietnam, paling tidak untuk waktu sekarang ini. Indonesia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk mencapai suatu persetujuan dengan Vietnam di belakang Muangthai.³

Dalam menanggapi Prinsip Kuantan, Muangthai menyetujui suatu Kamboja yang netral, tetapi tidak setuju bahwa resolusi PBB dikompromikan sehingga hanya menyerukan penarikan mundur sebagian

1 *Asiaweek*, 2 Mei 1980

2 Richard Nations, *loc. cit.*

3 *Ibid.*

pasukan Vietnam. Akhirnya Indonesia menyetujui untuk tetap memelihara pola hubungan diplomatik mereka sampai hasil kunjungan Menlu Co Thach ke negara-negara ASEAN dapat dinilai.

Dalam kunjungan PM Prem ke Manila yang baru diadakan pada tanggal 15-16 Mei 1980, Presiden Marcos memberi dorongan kepada Muangthai supaya tidak bersikap lunak terhadap Vietnam.

Dari hasil kunjungan PM Prem ke rekan-rekannya ini dapat dilihat tercapainya saling pengertian dan sikap yang lebih jelas, setelah sebelumnya timbul isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran RRC mengenai kemungkinan berubahnya sikap ASEAN sehingga tidak mengakui lagi Pemerintah Demokrasi Khmer Merah yang dibantunya. Dalam kunjungannya selama tiga hari (7-9 Mei 1980) ke Muangthai Menlu Huang Hua rupanya cukup puas dengan keputusan Muangthai untuk tetap berpegang pada resolusi PBB yang menuntut penarikan mundur seluruh pasukan Vietnam sebagai suatu persyaratan untuk penyelesaian masalah Kamboja. Namun Muangthai bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Hanoi sebelum penarikan mundur pasukan Vietnam secara total. Mengenai masalah suplai RRC untuk Khmer Merah lewat wilayah Muangthai, rupanya tidak diadakan pembicaraan langsung, hanya disampaikan pesan kepada Huang Hua bahwa wilayah Muangthai tidak dapat digunakan untuk suplai senjata bagi pasukan Pol Pot.¹

Demikianlah langkah-langkah pertama yang diambil ASEAN untuk menghadapi Vietnam dalam usaha mencari penyelesaian politik masalah Kamboja yang dapat diterima. Tetapi rupanya kunjungan Menlu Nguyen Co Thach baik ke Muangthai maupun ke Malaysia dan Indonesia tidak mencapai hasil yang memuaskan. Kedua pihak tidak berhasil mengatasi perbedaan pendapat mereka dan masing-masing tetap pada pendiriannya. Penyerbuan Vietnam memasuki wilayah Muangthai (kedua desa Koke Sung dan Baan Non Mark Moon sempat diduduki) untuk mencegah repatriasi pengungsi ke Kamboja pada tanggal 23 Juni 1980 makin mempersulit usaha penyelesaian masalah Kamboja.

1 Richard Nations, "Revolving Door Diplomacy", *FEER*, 16 Mei 1980

KONPERENSI MENLU ASEAN DI KUALA LUMPUR

Masalah penyerbuan Vietnam ke wilayah Muangthai menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan ke-13 para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur yang diadakan pada tanggal 25 Juni 1980. Pertemuan ini menghasilkan suatu "Komunike Bersama" yang pada hakekatnya merupakan tanggapan yang tegas terhadap sikap dan tindakan Vietnam. Para Menlu ASEAN bersatu mengecam tindakan militer yang melintasi perbatasan Muangthai.

Sebelumnya komunike ASEAN lebih lunak, hanya menyebut "pasukan asing" dan menggunakan kata-kata seperti "strongly regret" (sangat menyedihkan) dan "strongly deplored" (sangat menyayangkan). Tetapi sekarang ASEAN menggunakan istilah "agresi" (agression) dan "mengutuk" (condemn) serta jelas-jelas menyebut nama Vietnam.¹

Dalam pertemuan ini juga terjadi perbincangan mengenai dialog dengan Vietnam. Menurut Muangthai dan Singapura, dialog dengan Vietnam dalam waktu dekat ini tidak ada gunanya, sedangkan Indonesia, Malaysia dan Pilipina berpendapat bahwa dialog masih berguna. Akhirnya dihasilkan suatu sepakat kata bahwa ASEAN tidak akan mengadakan dialog kecuali atas inisiatif Vietnam.

Pada Konperensi ini hadir juga kelima Menlu dari Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Selandia Baru dan Australia untuk mengadakan dialog dengan para Menlu ASEAN. Mereka mendukung pernyataan para Menlu ASEAN yang mengutuk agresi Vietnam ke wilayah Muangthai.

JALAN BUNTU USAHA PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

Harapan akan adanya usul-usul konstruktif Vietnam dalam pembicaraannya dengan Malaysia, Muangthai dan Indonesia ternyata sia-sia dan keadaan bahkan makin "tegang" dan rawan dengan adanya penyerbuan Vietnam.

1 *Sinar Harapan*, 11-7-1980; *Tempo*, 12-7-1980, hal. 15

Vietnam tetap pada pendiriannya, tidak akan menarik mundur pasukannya selama merasa masih ada ancaman atau bahaya dari RRC. Selanjutnya Vietnam mengemukakan bahwa keadaan Kamboja sudah "tidak bisa dibalik" (irreversible) dan setiap pembicaraan mengenai masalah Kamboja harus menyertakan Pemerintah Kamboja yang sekarang ini. Vietnam menginginkan agar ASEAN mengakui kenyataan ini. Terlebih jauh Vietnam menginginkan adanya kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian regional sebelum penyelesaian masalah Kamboja. Vietnam telah menolak formula Kuantan yang diajukan ASEAN, sebab formula ini sama sekali tidak menyebutkan Amerika Serikat, yang menurut Vietnam telah mendukung Khmer Serei dan memainkan "kartu" Cina. Vietnam merasa kemerdekaannya diragukan formula tersebut, sebab negara ini berpendapat bahwa dirinya tidak berada di bawah pengaruh negara manapun.

Di lain pihak negara-negara ASEAN, yang hampir mengalami perbedaan pendapat di antara mereka dalam mencari jalan penyelesaian masalah Kamboja, akhirnya kembali kepada kesepakatan semula, sesuai dengan resolusi PBB. Sikap ini menjadi makin tegas dan jelas dalam Komunike Bersama ASEAN akibat tindakan militer Vietnam ke wilayah Muangthai. Bagi ASEAN penyelesaian krisis Kamboja harus dicapai sebelum masalah kerja sama, stabilitas dan perdamaian Asia Tenggara dibicarakan. Demikianlah tidak dicapai hasil yang dapat menyelesaikan konflik Kamboja.

LATAR BELAKANG PERBEDAAN SIKAP NEGARA-NEGARA

Kesibukan diplomatik sehubungan dengan penyelesaian masalah Kamboja itu sangat erat kaitannya dengan latar belakang sikap negara-negara yang telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka dan sekaligus menimbulkan "kemacetan".

Sebenarnya latar belakang sikap negara-negara, baik negara-negara ASEAN maupun Vietnam, berdasarkan pada kepentingan keamanan masing-masing, demikian pula sikap RRC.

Di antara negara-negara ASEAN telah timbul sedikit perbedaan pandangan mengenai ancaman bahaya bagi mereka, yaitu antara Muangthai dan Indonesia. Dalam hal ini Malaysia cenderung mempunyai sikap yang sama dengan Indonesia dan Singapura dengan

Muangthai. Indonesia melihat Vietnam dalam kaitannya dengan sikap politiknya terhadap RRC. Indonesia menganggap Vietnam perlu sebagai wilayah penyanggah terhadap pengaruh RRC dan oleh karena itu tidak menginginkan Vietnam menjadi terlalu lemah akibat perkembangan di Kamboja, sehingga tidak dapat mengimbangi RRC dalam jangka panjang. Dengan membiarkan Vietnam berpengaruh di Kamboja ("pre-eminence in Kampuchea") Indonesia dapat mencegah ancaman tersebut.¹

Sebaliknya Muangthai lebih melihat Vietnam sebagai ancaman terbesar dan langsung terhadap negaranya, karena letaknya yang berbatasan. Oleh karena itu Muangthai menginginkan Kamboja sebagai wilayah penyanggah antara dirinya dan Vietnam.²

Dalam konflik Kamboja ini, Muangthai mempunyai posisi yang paling sulit. Boleh dikatakan bahwa Muangthai harus menjaga hubungan baik dengan tiga pihak, di samping menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya. Dengan sesama negara ASEAN Muangthai harus melakukan penyesuaian pandangan dan sikap terhadap Vietnam, karena Vietnam sampai sekarang tidak mau mengakui ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari keengganan Vietnam untuk mengadakan dialog dengan Menlu Malaysia Ahmad Rithauddeen sebagai wakil ASEAN. Vietnam berharap bahwa pertemuan bilateral dengan negara-negara ASEAN akan memudahkan usahanya untuk mencapai kata sepakat mengenai Kamboja yang menguntungkan posisinya. Hal ini disadari oleh ASEAN. ASEAN tidak menolak pendekatan Vietnam secara bilateral, tetapi sementara itu pertemuan-pertemuan bilateral di antara negara-negara ASEAN sendiri tetap diadakan dalam rangka mencari suatu keserasian dan kesepakatan dalam menghadapi Vietnam.

Selain itu, Muangthai harus menunjukkan suatu sikap yang tidak menimbulkan prasangka dan memancing tuduhan, baik dari Vietnam maupun dari RRC. Di satu pihak Vietnam menuduh Muangthai membantu Khmer Merah dan menyediakan wilayahnya bagi suplai RRC untuk Khmer Merah. Menurut Vietnam Muangthai telah menjadi "kartu" di tangan Cina, karena membantu Cina dalam memperkuat kedudukan Pol Pot secara fisik dan bukan hanya lewat diplomasi. Ban-

1 Richard Nations, *loc. cit.*, hal. 12; Richard Nations, "The Looming Split in the Five", *FEER*, 20 Juni 1980, hal. 12

2 *Ibid.*

tuan kepada Pol Pot merupakan ancaman karena akan memperpanjang peperangan di Kamboja dan dapat menggagalkan usaha Vietnam menciptakan solidaritas Indocina. Tetapi di lain pihak Muangthai harus menghadapi prasangka RRC yang kuatir bahwa Muangthai akan mencapai persetujuan dengan Vietnam yang mengancam posisinya. Kesulitan inilah yang dihadapi Muangthai. Oleh karena itu Muangthai harus dapat menunjukkan suatu sikap yang netral yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak.

Latar belakang sikap RRC dan Vietnam terhadap Muangthai ini sangat erat kaitannya dengan "permusuhan" yang terjadi di antara mereka. Bagi Vietnam ancaman RRC sudah menjadi semacam kepercayaan, karena Vietnam dan RRC sudah menjadi "musuh bebuyutan" sejak 4000 tahun yang lalu. Alasan utama invasi Vietnam ke Kamboja adalah menjamin keamanannya terhadap ancaman Cina. Vietnam menganggap pengaruh Cina di Kamboja sebagai awal dari usahanya untuk menguasai Indocina. Tindakan invasi Vietnam ini didukung pula oleh Uni Soviet yang juga tidak menginginkan meluasnya pengaruh Cina. Hal ini ditentang Cina karena Cina merasa terancam oleh pengepungan Uni Soviet lewat Vietnam. Hal inipun dilatarbelakangi oleh "pertentangan" RRC-Uni Soviet. Adanya permusuhan dan pertentangan di antara mereka inilah yang menimbulkan perasaan terancam yang pada gilirannya menjadi motivasi pendekatan mereka terhadap negara-negara ASEAN.

Kekuatiran Cina akan perubahan sikap ASEAN terhadap Vietnam dengan mengakui regim Heng Samrin merupakan latar belakang kegiatan kunjungan Menlu Huang Hua ke negara-negara ASEAN. RRC berusaha untuk "mengajak" ASEAN memandang Uni Soviet sebagai suatu ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Asia Tenggara, terutama dalam masalah Kamboja. Paling tidak RRC menginginkan agar ASEAN tidak menganggap dirinya sebagai bahaya.

Sebaliknya Vietnam kuatir bahwa ASEAN secara langsung dan tidak langsung ditarik ke dalam strategi Cina terhadap Vietnam. Hal ini sehubungan dengan sikap Muangthai yang dianggapnya sebagai "kartu" Cina. Vietnam, yang melihat ASEAN bertekad untuk mempertahankan solidaritas di antara negara-negara anggotanya, merasa kuatir bahwa ASEAN akan mengakomodasi sikap dan kebijaksanaan Muangthai tersebut. Atas dasar ini maka suatu ofensif diplomasi ke ASEAN mempunyai arti yang penting bagi Vietnam.

Vietnam ingin menyatakan kepada negara-negara ASEAN, khususnya Muangthai, bahwa dalam jangka panjang ancaman terhadap Asia Tenggara bukanlah datang dari Vietnam (Indocina), tetapi dari Cina. Oleh karena itu Vietnam tidak akan menarik mundur pasukannya dari Kamboja selama masih merasa ada ancaman dari Cina.

Tetapi mempertahankan pasukannya di Kamboja merupakan beban yang sangat berat bagi Vietnam, terutama dalam bidang ekonomi. Sebaliknya menarik mundur pasukannya dari Kamboja baginya merupakan suatu resiko yang besar, karena akan memudahkan Khmer Merah mengalahkan regim Heng Samrin yang didukungnya. Apalagi dengan makin kuatnya kembali Khmer Merah seperti terungkap dalam berita-berita terakhir. Atas dasar ini pula Vietnam berusaha mengadakan dialog dengan masing-masing negara ASEAN untuk mendapatkan pengakuan mereka terhadap rezim Kamboja sekarang ini.

PROSPEK PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa sulitnya menemukan suatu kesepakatan mengenai suatu persoalan yang menyangkut latar belakang kepentingan yang berbeda dari negara ke negara. Untuk mencapai suatu kesepakatan diperlukan suatu pergeseran sikap yang menghasilkan usul-usul baru sebagai kompromi yang dapat diterima semua pihak.

Penyerbuan Vietnam ke Muangthai telah membangkitkan ketidakpercayaan di pihak ASEAN karena secara demikian Vietnam telah melanggar janjinya untuk tidak melanggar kedaulatan Muangthai. Peristiwa ini telah menimbulkan reaksi keras dan sikap yang makin tegas dari ASEAN seperti tercermin dalam komunike bersamanya yang menyerukan penarikan mundur pasukan Vietnam.

Sikap keras Vietnam sulit dihadapi atau dilawan dengan sikap keras negara-negara lain, sebab ini hanya akan mengundang konflik terbuka yang akan mengancam keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Peristiwa penyerbuan Vietnam ke wilayah Muangthai disusul dengan pengiriman 3 divisi baru RRC ke perbatasannya dengan Vietnam. Walaupun tidak terjadi "serangan hukuman" baru, tindakan ini dapat dilihat sebagai suatu "peringatan" dari RRC untuk Vietnam bahwa RRC tidak akan tinggal diam jika terjadi penyerbuan serius ke

Muangthai. Bukan tidak mungkin bahwa apabila konflik ini makin meningkat berbagai negara akan mengenakan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Vietnam. Semuanya ini akan makin mendekatkan Vietnam ke Uni Soviet dan berarti suatu kesempatan bagi Uni Soviet untuk makin melibatkan dirinya dan menanamkan pengaruhnya di Kamboja khususnya dan Indocina umumnya. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa Uni Soviet sangat menginginkan pangkalan-pangkalan di Cam Ranh, Dan Nang dan bahkan Kompong Som di Kamboja.

Semua kemungkinan, baik "pecahnya konflik terbuka" maupun "penyelesaian secara damai", banyak ditentukan oleh kemauan politik dan sikap masing-masing pihak, sikap keras yang akan meningkatkan konflik di satu pihak dan sikap yang lebih lunak dan memungkinkan kompromi di lain pihak.

Suatu usul Kamboja netral dengan suatu pemerintah koalisi dan ditarik mundurnya pasukan Vietnam ditolak Vietnam. Vietnam bahkan telah bertindak lebih jauh dengan merencanakan pemilihan umum di Kamboja. Pengakuan India terhadap rezim Heng Samrin, dikuatirkan akan disusul pengakuan oleh negara-negara lain. Seperti diketahui, dalam 9 bulan, 21 negara telah mengakui rezim ini.¹ Kemungkinan (alternatif) Pangeran Sihanouk sebagai calon kepala pemerintah sebuah Kamboja yang netralpun sulit dilaksanakan.

Melihat situasi yang demikian rumit ini, kita dapat membayangkan bahwa situasi di Kamboja akan berlarut-larut jika tidak dicapai suatu penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Sebenarnya formula Kuantan dapat dipertimbangkan untuk menjadi titik tolak baru bagi penyelesaian masalah Kamboja, walaupun mungkin diperlukan penyesuaian sikap dan pendekatan-pendekatan yang lebih lanjut dari berbagai pihak. Pendekatan-pendekatan ini tidak saja harus dilakukan di antara negara-negara ASEAN sehubungan dengan persepsi ancaman yang berbeda di antara mereka, tetapi juga antara Vietnam dan ASEAN dan antara negara-negara besar Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC.

Bagi negara-negara ASEAN, posisi Muangthai yang sulit dan terancam langsung oleh perkembangan di Indocina harus selalu

1 Nayan Chanda, "The Making of A Bloc", *FEER*, 30 Mei 1980, hal. 18

diperhitungkan dalam mencari alternatif baru. Begitu pula posisi RRC yang tidak akan tinggal diam selama merasa terancam oleh pengepungan Uni Soviet, terutama karena Kamboja berada di bawah Vietnam yang menjadi satelit Uni Soviet. Demikian pula Vietnam yang perlu diyakinkan bahwa tidak ada ancaman dari Cina.

Untuk mencapai hal itu, di antara langkah-langkah yang harus ditempuh ialah "melepaskan" Vietnam dari rangkulan Uni Soviet. Dalam hal ini turut sertanya Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa Barat dalam bantuan ekonomi bagi Vietnam yang makin parah perekonomiannya akan mengurangi ketergantungannya pada Uni Soviet. Lebih jauh Amerika Serikat dapat mengambil prakarsa untuk menormalisasi hubungannya dengan Vietnam. Vietnam mungkin masih bisa diharapkan untuk melepaskan dirinya dari pengaruh Uni Soviet, karena Vietnam adalah suatu negara komunis yang nasionalis.

Selanjutnya ASEAN dapat memainkan peranan dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan RRC maupun dengan Vietnam khususnya dan Indocina umumnya. Vietnam sangat mengharapkan agar ASEAN turut serta mengadakan pendekatan terhadap RRC agar menghentikan ancamannya terhadap dirinya. Demikian pernyataan Menlu Nguyen Co Thach dalam suatu pertemuan pers di Jakarta baru-baru ini.¹

Dari uraian di atas adalah jelas bahwa alternatif yang mungkin diterima ASEAN adalah terbentuknya suatu pemerintahan di Kamboja yang mempunyai hubungan khusus dengan Vietnam, bebasnya Vietnam baik dari pengaruh Uni Soviet maupun RRC, dan ditariknnya sebagian besar pasukan Vietnam.

Dengan demikian penyelesaian krisis Kamboja selain membutuhkan waktu, juga menuntut kemauan politik yang kuat, saling mempercayai dan sikap waspada dari negara-negara ASEAN. Kini ASEAN telah sepakat untuk tidak berdialog dengan Vietnam, kecuali atas inisiatif Vietnam. Vietnam merupakan "kunci" sejauh dialog dan penyelesaian damai hanya mungkin kalau negara ini benar-benar menginginkan perdamaian yang didengung-dengungkannya.

1 *Merdeka*, 26 Juni 1980